

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Kontinjensi**

Teori kontinjensi berpendapat bahwa sistem kontrol dan desain bergantung pada konteks organisasi dimana di implementasikan (Fisher, 1998). Otley (1991) berpendapat teori akuntansi manajemen adalah bisnis guna mengidentifikasi sistem pengendalian berbasis akuntansi yang paling tepat untuk semua keadaan. Dalam kebijakan akuntansi, manajemen selalu berusaha untuk mengadopsi sistem mereka agar lebih memiliki manfaat dalam situasi tertentu. Karenanya, sangat penting untuk mengidentifikasi variabel kontingen kunci dan mempertimbangkan dampaknya terhadap desain sistem kontrol. Hubungan yang lebih baik antara sistem yang menggunakan variabel kontingen diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Zainuddin (2003) bertujuan untuk menguji "kecocokan" antara SPM, sedangkan sistem kontrol manajemen berbasis kontinjensi (SPM) menggunakan variabel konteks dan variabel hasil sebagai variabel dependen.

Teori kontinjensi pengendalian manajemen muncul dari adanya estimasi perbaikan universal. Sistem manajemen bisnis bisa diimplementasikan pada semua perusahaan dalam berbagai keadaan. Pendekatan universal ini merupakan hasil pengembangan dari pendekatan manajemen ilmiah yang bertujuan untuk menemukan formula terbaik dalam

proses produksi suatu perusahaan. Bahkan, sistem pengendalian manajemen tunggal dapat diterapkan pada beberapa perusahaan dengan karakteristik dan ruang lingkup bisnis yang sama. Berdasarkan fenomena ini, teori kontinjensi pengendalian manajemen terletak di antara dua ekstrem. Contoh ekstrem pertama dari teori kontinjensi, kemudian pengendalian manajemen adalah contoh khusus situasi, atau contoh pengendalian lengkap sangat ditentukan oleh situasi langsung. Contoh ekstrem kedua adalah bahwa sistem pengendalian manajemen belum digeneralisasi yang digunakan oleh beberapa perusahaan yang berbeda.

Teori Kontinjensi yaitu pendekatan yang menginginkan supaya kinerja dari suatu organisasi bisa optimal. Teori kontinjensi ini berperan dalam pemberian perhatian mengenai sifat lingkungan pada strategi dan struktur organisasi, keperluan yang dibutuhkan organisasi, dan juga cara organisasi tersebut itu menjalankan struktur organisasi yang baik harusnya menanggapi sejumlah variable (*contingencies*). Ada beberapa hal yang menurut teori kontinjensi penting dalam suatu organisasi diantaranya penggunaan teknologi, penggunaan lingkungan operasi dan ukuran organisasi. Efektivitas atau berhasilnya pengelolaan dalam suatu organisasi tidak harus tertuju pada cara dan tujuan pengelolaan, namun juga dilihat keadaan lingkungan yang berada di luar kendali. Selain memiliki pengaruh pada kinerja dalam proses pengendalian yang dilakukan, lingkungan juga memengaruhi apa jenis pengendalian yang nantinya digunakan (Gudono, 2017).

## 2. Kompetensi

Kompetensi mencakup seperangkat atribut yang dimiliki individu sebagai kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku yang bisa memberikan peningkatan pada kinerja (Prabawati, Meirinawati dan Aoktariyanda, 2018). Istilah tersebut menunjukkan secara tersirat bahwa kemampuan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas operasional yang kompleks. Selain itu, kegunaan kompetensi dalam bidang manajemen personalia, yaitu dalam rekrutmen individu, pengembangan, tetapi juga dalam perencanaan strategis dan manajemen kinerja. Kompetensi staf ialah kemampuan individu untuk melakukan tanggungjawab dan tugas yang dibebankan dengan dukungan pengalaman, pelatihan dan pelatihan yang sesuai. Karenanya, kompetensi individu (sumber daya manusia) memiliki kaitan dengan keterpaduan kecerdasan, sifat, kekuatan fisik dan tingkah laku sumber daya manusia dipengaruhi oleh faktor luar (lingkungan) dan keturunan. Sementara itu, pencapaian setiap individu dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mencapai kepuasan pribadi (Muda dkk, 2017).

Menurut Andono, dkk (2004), penilaian terhadap kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia bisa dilakukan dengan melihat kompetensi sumber daya tersebut dan level of responsibility. Sementara itu deskripsi jabatan dijadikan sebagai acuan untuk melihat pembagian tugas atau tanggung jawab yang harus dilakukan sudahkah berjalan baik atau belum baik. Apabila deskripsi jabatan tidak ada atau tidak jelas maka tugas-tugas sumber daya

tidak dapat terlaksana dengan baik. Adapun penilaian kompetensi bisa dinilai dari keterampilan dalam melaksanakan tugas, *background* pendidikan dan program latihan-latihan yang pernah diikuti.

Pengertian kompetensi yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan atau melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan dan keterampilan serta didukung oleh sikap atau etika sesuai dengan aturan yang didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut Wibowo (2016). Menurut Michael Amstrong dalam Sedarmayanti (2017) menyatakan “Kompetensi ialah apa saja yang individu bawa di tempat kerja yang berbeda-beda baik tingkat-tingkat maupun tipe perilaku yang berbeda-beda.

PSAP 1 Paragraf 24 menyatakan, kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu. Kompetensi adalah karakteristik seseorang yang didasarkan pada capaian kinerja dalam pekerjaannya. Pegawai yang belum mempunyai pengetahuan atau wawasan yang baik maka akan mengalami hambatan yang bisa berakibat terjadi hambatan yang menyebabkan pemborosan waktu, bahan dan tenaga.

### **3. Sistem Pengendalian Internal**

Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengatur bahwa Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Di dalam pemerintah daerah dan pusat pengendalian intern dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh. Pengendalian dalam kegiatan pemerintahan dilakukan oleh menteri, gubernur dan bupati yang sifatnya wajib supaya tercapai pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, akuntabel dan efisien.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menegaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas unsur

a. Lingkungan Pengendalian

Pemimpin dalam instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara dan menciptakan lingkungan pengendalian yang menyebabkan perilaku kondusif dan positif guna mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya melalui komitmen antara pegawai, penegakan nilai etika dan integritas, penyusunan struktur organisasi yang cocok dengan keperluan, struktur organisasi yang dibentuk

sesuai keperluan, pembagian tanggung jawab dan wewenang yang tepat sasaran, penyusunan dan pengaplikasian kebijakan yang baik dan sumber daya manusia yang dibijak, efektifnya peran aparat pengawasan intern pemerintah, serta adanya hubungan yang baik dengan lembaga pemerintahan yang terkait.

b. Penilaian risiko manajemen

Sebelumnya pimpinan lembaga harus menetapkan visi, misi, dan tujuan lembaga, kemudian lembaga secara efisien mengelola risiko yang bisa menjadi penghambat dalam mencapai tujuan baik di dalam maupun di luar lembaga, dan mengidentifikasi secara efektif. Penilaian risiko dalam arti terdiri dari identifikasi analisis risiko.

c. Sistem komunikasi dan informasi

Pimpinan Instansi Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mencatat, mengidentifikasi dan memberikan informasi pada waktu yang tepat dalam instansi pemerintah tersebut guna mencapai komunikasi yang efektif. Pemerintah harus sekurang-kurangnya memafaatkan dan menyediakan banyak sarana komunikasi serta mengembangkan, mengelola dan memperbarui sistem informasi secara berkelanjutan. Informasi yang bisa diandalkan dan relevan harus dimiliki oleh instansi pemerintah baik itu menyangkut keuangan atau non keuangan yang ada kaitannya dengan kejadian internal dan eksternal.

d. Aktivitas Pengendalian

Pengertian pengendalian ialah tindakan dan cara atau prosedur dalam mengendalikan suatu kegiatan sehingga perintah atasan dapat dilaksanakan

dengan baik. Untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi, maka pelaksanaan pengendalian harus dilakukan dengan efektif dan efisien. Dalam kegiatannya, pengendalian terdiri dari review mengenai kinerja dari instansi pemerintah, pengendalian dari pengelolaan sistem informasi, sumber daya manusia yang diberi pembinaan, pengendalian pada fisik atas asset, penetapan ukuran dan indikator kerja, pemisahan pada fungsi, otorisasi atas kejadian dan transaksi yang penting, catatan yang tepat waktu dan akurat atas kejadian dan transaksi, dokumentasi dan akuntabilitas yang baik atas kejadian, transaksi dan Sistem Pengendalian Intern yang penting.

e. Pemantauan

Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilakukan dengan cara memantau secara terus-menerus, evaluasi secara terpisah dan tindakan lanjutan sebagai saran dari hasil reuiu, audit dan lainnya. Pemantauan berkelanjutan atau terus-menerus dilakukan dengan aktivitas yaitu pengelolaan yang dilakukan secara rutin, perbandingan, supervise, rekonsialisasi dan melalui tindakan lain yang sesuai. Sementara itu, evaluasi secara terpisah yaitu dengan cara menilai diri, pengujian efektivitas, review oleh pejabat yang bertugas dalam mengawasi dan syarat-syarat telah terpenuhi sebagai ahli auditor. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 49 Aparat pengawasan intern pemerintah terdiri atas:

1) BPKP

- 2) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern
- 3) Inspektorat Provinsi dan
- 4) Inspektorat Kabupaten/Kota.

#### **4. Pemanfaatan teknologi Informasi**

Aini (2017) pengertian teknologi informasi yaitu suatu teknologi yang berfungsi dalam pengolahan data yang didalamnya terdiri dari memperoleh, memproses, menyimpan, menyusun dan memanipulasi suatu data dengan beragam cara dalam rangka menghasilkan data yang memiliki kualitas yaitu data yang akurat, relevandan tepat waktu yang dapat digunakan dalam kepentingan bisnis, pribadi dan pemerintahan serta merupakan data yang bisa dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan. Adanya teknologi informasi memiliki manfaat yang penting dalam menyusun laporan keuangan sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu dan handal (Pamungkas, 2017).

#### **5. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)**

Pengertian penerapan dalam KBBI ialah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut para ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

PP No. 71 tahun 2010, Bastian (2010), dan Mahmudi (2011), Standar Akuntansi Pemerintahan ialah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dan dijadikan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah karena mempunyai kekuatan hukum.

## 6. Kualitas Laporan Keuangan

Pengertian dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ialah derajat atau taraf dari laporan keuangan yang telah dikelola yang menginformasikan mengenai transaksi dan posisi keuangan dalam satu periode yang dilakukan pemerintah daerah Andrianto (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Untuk mengukur Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menurut PP No. 71 Tahun 2010.

Syarat normatif sangat berguna agar laporan keuangan bisa sesuai dengan kualitas. Adapun karakteristik yang harus dipenuhi agar laporan keuangan berkualitas sebagai berikut:

### a. Relevan

Suatu laporan keuangan dikatakan relevan jika data-data yang ada di dalam laporan bisa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Data yang relevan memiliki ciri-ciri yaitu:

- 1) Ada umpan balik yang positif, maksudnya adalah informasi atau data pada laporan keuangan bisa mengoreksi kenyataan di masa lalu para pemakainya.
- 2) Memberikan fungsi prediktif, ialah informasi atau data di laporan keuangan bisa dijadikan dasar memprediksi atau meramal di masa yang akan datang.
- 3) Tepat waktu, ialah laporan keuangan dilaporkan dengan tepat waktu agar bisa bermanfaat dan memiliki pengaruh pada pengambilan keputusan.
- 4) Lengkap, adalah informasi atau data seluruhnya mencakup seluruh data atau informasi akuntansi yang bisa memberi pengaruh pada keputusan yang akan diambil. Informasi atau data yang menjadi latar belakang disetiap butir informasi utama yang ada di laporan keuangan dipaparkan secara gamblang supaya dapat mencegah kekeliruan saat menggunakan informasi tersebut.

b. Andal

Pada laporan keuangan data atau informasi harus sesuai dan tidak ada kesalahan, fakta yang disajikan sesuai serta bisa diverifikasi. Informasi bisa saja relevan, namun ketika penyajian atau hakikatnya tidak bisa diandalkan informasi tersebut bisa menyesatkan. Karakteristik dari informasi andal diantaranya:

- 1) Penyajian Jujur, yaitu menyajikan apa adanya atau jujur peristiwa atau transaksi yang dilakukan.
- 2) Dapat Diverifikasi (*verifiability*), sajian informasi bisa diuji dan ketika informasi tersebut diuji oleh pihak lain maka hasilnya sama atau hampir sama dan tidak berbeda jauh.
- 3) Netralitas, disajikannya informasi untuk keperluan umum bukan untuk pihak tertentu.

c. Bisa dibandingkan

Suatu informasi yang ada di laporan keuangan memiliki manfaat yang lebih apabila bisa dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain atau laporan keuangan periode sebelumnya termasuk metode akuntansi yang konsisten.

Jika kebijakan akuntansi saat ini lebih buruk dari entitas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Bisa dipahami

Maksudnya adalah informasi bisa dipahami oleh para pengguna dan istilah atau kata-kata yang dipakai disesuaikan dengan batas kemampuan atau pemahaman pengguna. Maka dari itu, para pengguna dianggap mempunyai wawasan yang cukup terhadap lingkungan dan aktivitas entitas pelaporan serta pengguna memiliki kemauan untuk memahami informasi yang dimaksud.

Selaras dengan penelitian Mardiasmo (2002) menyatakan saat ini di Indonesia fenomena yang ada dalam perkembangan pada sektor publik ialah akuntabilitas publik semakin mendapat tuntutan dari lembaga-lembaga public yaitu lembaga daerah maupun pusat. Pada kegiatan melaporkan keuangan, wajib bagi pemerintah yang menyusun laporan untuk menyajikan data yang memiliki manfaat untuk para pengguna informasi keuangan pemerintah, dengan demikian pengguna bisa memberikan penilaian akuntabilitas laporan yang disajikan dan memberikan keputusan sosial, ekonomi maupun politik baik langsung maupun tidak langsung ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung.

Berdasarkan SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Komponen-komponen yang ada dalam satu set laporan keuangan meliputi laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial.

Berikut komponen-komponennya:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional
- 5) Laporan Arus Kas
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas
- 7) Catatan Atas Laporan Keuangan

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut Penelitian terdahulu yang akan dijadikan acuan dalam Penelitian ini :

**Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu**

NO	Penulis Dan Identitas Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil
1	Armel, Gustika JOM Fekon, Vol.4 No.1 (Februari) 2017	Independen : X1 : Kompetensi Sumberdaya Manusia X2 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan X3: Pemanfaatan Teknologi Informasi X4 : Sistem Pengendalian Internal Dependen : Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Kompetensi memberi pengaruh Positif Signifikan pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 3. Pemanfaatan teknologi Informasi memiliki pengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 4. Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh Positif Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2.	Ratna Wijayanti Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 3, Maret 2017 Issn : 2460-0585	Independen: X1 : Kompetensi Sumber daya Manusia Dependen : Y : Kualitas Laporan Keuangan Daerah	1. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara signifikan oleh Kompetensi Sumberdaya Manusia.
3.	Abdul Aziiz Ramadhani B 200 140 367	Independen : X1 : Kompetensi Sumberdaya Manusia X2 : Penerapan Standar Teknologi Informasi	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

NO	Penulis Dan Identitas Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil
		X3 : Sistem Pengendalian Internal Dependen : Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2. Penerapan Standar Teknologi Informasi Tidak memiliki pengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Sistem Pengendalian Internal Tidak memiliki pengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4.	Abdul Hakim, Kirmizi Ritonga, Sem Paulus Published February 2017 JOM Fekon Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017	Independen : X1 : Kompetensi Sumberdaya Manusia X3 : Sistem Pengendalian Internal Dependen : Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh Positif Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh Positif Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5.	Carvalho, Sesilia Bernadina Rosa (2018)	Independen : X1 : Kompetensi Sumberdaya Manusia X2 : Penerapan Standar Teknologi Informasi X3 : Sistem Pengendalian Internal Dependen : Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Kompetensi memiliki pengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Penerapan Standar Teknologi Informasi memiliki pengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
6.	Hanif, Mochammad	Independen : X1 : Kompetensi	1. Kompetensi Sumberdaya Manusia Tidak memiliki

NO	Penulis Dan Identitas Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil
	Fakhrudin And , Shinta Permata Sari S.E, M.M (2020)	Sumberdaya Manusia X2 : Penerapan Standar Teknologi Informasi Dependen : Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	pengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Penerapan Standar Teknologi Informasi memiliki pengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
7.	Surya Adhitama Vol 5, No 2 (2017)	Independen: X1 : Kompetensi Sumberdaya Manusia Dependen : Y : Kualitas Laporan Keuangan Daerah	1. Kompetensi Sumberdaya Manusia memiliki pengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
8.	Wildan Ahmad Bachtiar Ahyar, Dr. Elvira.S.E.,M.Si., AK.,CA, (2019)	Independen: X1 : Kompetensi Sumberdaya Manusia Dependen : Y : Kualitas Laporan Keuangan Daerah	1. Kompetensi Sumberdaya Manusia memiliki pengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
9.	Rama Ardianto Vol.6.No.1 Januari (2019)	Independen : X1 : Kompetensi Sumberdaya Manusia X2 : Penerapan Standar Teknologi Informasi X3 : Sistem Pengendalian Internal Dependen : Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. 2. Penerapan Standar Teknologi Informasi memiliki pengaruh Positif Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Laporan keuangan pemerintah daerah kualitasnya dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Internal.
10.	Irzal Tawaqal, Suparno Vol. 2,	Independen : X1 : Kompetensi	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki

NO	Penulis Dan Identitas Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil
	No. 4, (2017) Halaman 125-135	Sumberdaya Manusia X2 : Penerapan Standar Teknologi Informasi X3 : Sistem Pengendalian Internal Dependen : Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	pengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. 2. Penerapan Standar Teknologi Informasi memiliki pengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
11.	Khoirina Kencana Ningrum 2018-04-10	Independen : X1 : Kompetensi Sumberdaya Manusia X2 : Penerapan Standar Teknologi Informasi X3 : Sistem Pengendalian Internal Dependen : Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. 2. Penerapan Standar Teknologi Informasi memiliki pengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh Positif Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
12.	Iskandar Muda1, Deni Yuwilia Wardani2, Erlina3, Azhar Maksum4, Ade Fatma Lubis5, Rina Bukit6 & Erwin Abubakar7 31st October	Independen : X1 : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 : Penggunaan Teknologi Informasi Dependen : Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah dipengaruhi oleh Kompetensi Sumber Daya Manusia. 2. Secara signifikan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi Penggunaan Teknologi Informasi.

NO	Penulis Dan Identitas Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil
	2017. Vol.95. No 20		
13.	Daryanto, Wiwiek, Mardawiyah And Sari, Bianda Puspita And Putri, Michelle Ayu Anggita (2020) South East Asia Journal Of Contemporary Business, Economics And Law, 21 (2). hal. 1-8. ISSN 2289-1560	Independen : X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 : Penggunaan Teknologi Informasi X3 : Sistem Pengendalian Internal Dependen : Y : Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia memberi pengaruh Positif pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Penggunaan Teknologi Informasi memberi pengaruh Positif Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Sistem Pengendalian Intern memberi pengaruh Positif pada Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### C. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

#### 1. Kerangka Pemikiran

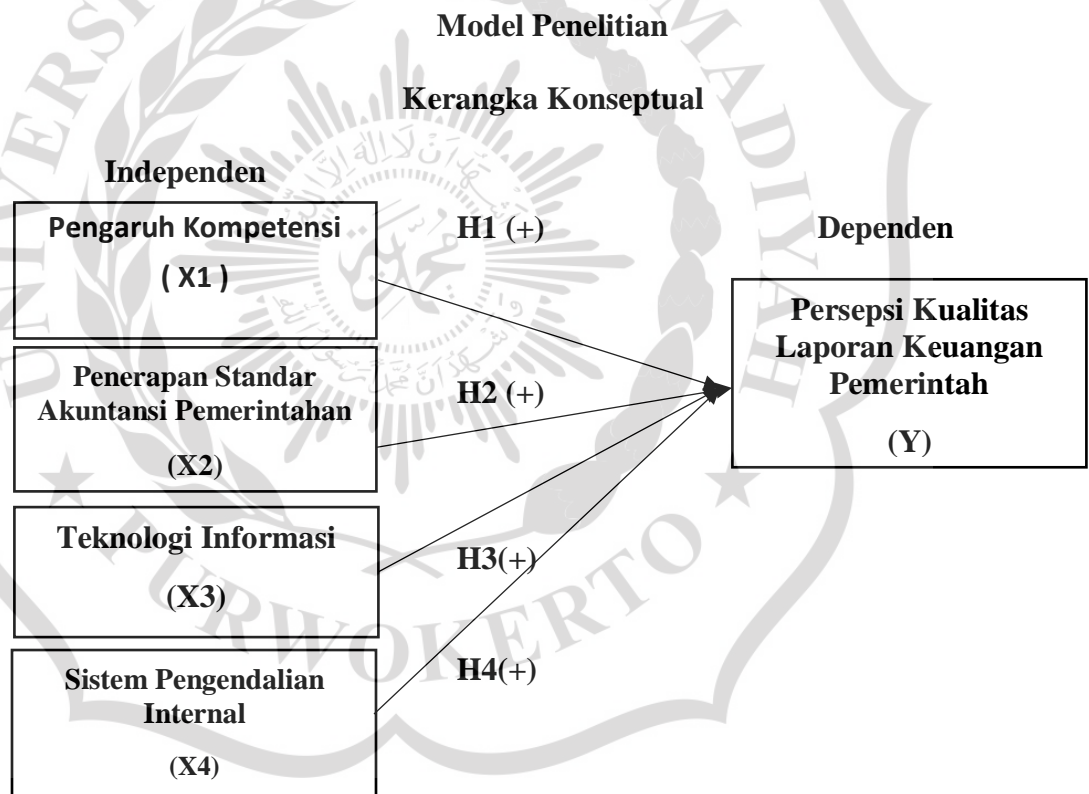
Dengan teori Kontijensi tersebut maka asumsi adalah dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang tepat maka setiap potensi kebocoran anggaran, ketidaktepatan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan dapat diminimalisir. Sehingga sejak awal pengakuan pencatatan transaksi, penggolongan akan sesuai prosedur akuntansi yang ditetapkan atau Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Hal tersebut bisa mendorong Kualitas Laporan Keuangan Daerah menjadi semakin baik.

Penelitian Santander-Asotorga (2019) bahwa penggunaan teori kontijensi memiliki kaitan erat dengan efek lingkungan, teknologi dan struktur

organisasi yang meliputi sumber daya manusia di dalamnya. Dalam organisasi, penerapan teknis berhubungan dengan kapasitas teknologi.

Teori kontijensi, juga menegaskan bahwa adanya kompetensi sumber daya manusia yang meliputi sejumlah atribut yang dilekatkan pada individu sebagai kombinasi pengetahuan, keahliannya dan tingkah laku yang bisa meningkatkan kinerja (Prabawati, Meirinawati dan Aoktariyanda, 2018).

Berikut model kerangka konseptual penelitian ini:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## 2. Pengembangan Hipotesis

### a. Hubungan Kompetensi Terhadap Persepsi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

(Setyowati dkk, 2016) menjelaskan pengertian kompetensi sumber daya manusia ialah kemampuan dari individu dalam melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuan, pengetahuan dan keterampilannya yang diperoleh dari latihan, pendidikan dan pengalaman. SDM yang memiliki kompeten akan lebih mudah memahami akuntansi, dengan demikian tugas-tugasnya bisa dilakukan dengan tepat waktu dan akurat.

Menurut Sudiarti & Juliarsa, (2020) Kompetensi Sumber Daya Manusia ialah ciri dasar menurut seorang yang bisa menjadikannya bekerja dengan maksimal dalam menjalankan tanggung jawab dan tugas ialah dengan bekal pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang memadai. Tingkat kompetensidibutuhkan supaya bisa mengetahui taraf kinerja dibutuhkan buat kategori baik atau rata-rata. Penentuan kompetensi yg diharapkan tentunya akandapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, perencanaan, evaluasi kinerja & pengembangan sumber daya manusia.

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kemampuan, yaitu kemampuan individu, kelembagaan atau sistem guna menjalankan fungsi atau wewenangnya dalam merealisasikan tujuan secara efisien dan efektif. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untuk

menghasilkan produk dan hasil. Sumber daya manusia diukur berdasarkan pelatihan akademik yang diperoleh karyawan.

Laporan keuangan yang berkualitas bisa disusun apabila sumber daya manusia memiliki kompeten dengan didukung oleh *background* pendidikan yang baik, sering ikut pelatihan-pelatihan dan punya pengalaman dalam bidang keuangan. Jika sumber daya manusianya bagus laporan yang dihasilkan juga akan bagus. Akan tetapi, jika sumber daya manusia tidak memiliki kompeten laporan keuangan yang dihasilkan tidak berkualitas.

Selaras dengan pernyataan di atas Erawati & Kiranayanti (2016), Indrastuty & Tanjung Hariani (2016), Alamsyah dkk, (2017), Baturante dkk, (2018) melakukan penelitian yang menghasilkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi secara positif oleh sumber daya manusia. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah

**H1: Kompetensi berpengaruh terhadap Persepsi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.**

**b. Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Persepsi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**

Menurut Bastian (2005) dalam Kusumah (2012) Standar Akuntansi Pemerintah ialah prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyajikan dan menyusun laporan keuangan pemerintah. PP No.24 Tahun 2005 tentang penyajian laporan keuangan menguatkan SAP yang sekarang dipakai oleh pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan menjalin bahwa penyusunan laporan keuangan yang berlaku harus sesuai dengan aturan. SAP ialah standar apakah laporan keuangan yang disajikan memenuhi kualifikasi informasi keuangan yang memiliki manfaat untuk para penggunanya. Informasi yang memiliki manfaat merupakan suatu indikator bahwa bagi para penggunanya. Informasi yang memiliki manfaat merupakan indikator bahwa kualifikasi laporan keuangan sudah terpenuhi.

Penelitian mengenai standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan oleh Abdullah dan Akib (2018), dan Inapty dkk, (2016) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

## **H2 : Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Persepsi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**

### **c. Hubungan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**

Teknologi informasi yang semakin maju memberi pengaruh pada kualitas laporan keuangan dan potensi penggunaannya yang luas bisa memberi peluang untuk berbagai pihak untuk mengelola, mengakses informasi dengan akurat dan cepat. Maka dari itu, teknologi informasi memiliki peran penting dalam membantu proses penyajian laporan keuangan

dan pengolahan data transaksi supaya lebih cepat sehingga laporan keuangan bisa memenuhi ketepatan waktu.

Sikap atau perilaku akuntan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja dan menyelesaikan tugasnya. Desain sistem informasi berbasis website atau teknologi computer merupakan bentuk perkembangan dari teknologi informasi yang direspon oleh organisasi. Penguasaan karyawan dalam menggunakan TI sangat memengaruhi kinerja organisasi Siahaya, dkk (2015).

Penggunaan teknologi informasi ialah suatu cara mendukung keberhasilan misi dalam melakukan visi dan misi pengelolaan keuangan yang baik. Melalui teknologi informasi ini dapat membantu pegawai pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah dan memberi kemudahan dalam mengelola data keuangan secara sistematis. Memudahkan dalam pengolahan data keuangan secara sistematis. Penelitian Pangestu, dkk (2019), Darwis dan Meliana (2020) menunjukkan penggunaan teknologi memiliki pengaruh pada kualitas laporan keuangan, hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi yang semakin baik akan memberikan pengaruh pada kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2017) mengatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Rahayu, dkk (2017) yang juga mengatakan bahwa Pemanfaatan

Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah

**H3: Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Persepsi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.**

**d. Hubungan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Persepsi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**

Pengendalian internal ialah cara guna mengukur dan mengawasi sumber daya di organisasi serta memiliki peran penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan. Pengendalian intern diri atas prosedur dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai sasaran dan menyediakan atau menjamin informasi keuangan yang andal, serta menjamin kepatuhan pada hukum dan aturan yang ada. Tujuan pengendalian intern pada tingkat organisasi memiliki kaitan dengan umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi.

PP No 60 Tahun 2008 tentang SPIP memberikan penjelasan bahwa pimpinan dan seluruh karyawan melakukan kegiatan terus-menerus guna memastikan kepercayaan yang baik pada organisasi melalui laporan keuangan yang baik, efisien, menjaga asset pemerintah, efektif karena patuh pada hukum. Penelitian tentang sistem pengendalian dalam pengaruhnya pada kualitas laporan keuangan sudah dilaksanakan oleh Aprilia dan Ikyarti

(2019), Widari dan Sutrisno (2017) menghasilkan hasil positif. Maka dari itu berikut hipotesis pada penelitian ini:

**H4: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Persepsi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**

